

SKRIPSI

**RELASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN WISATA PULESARI KALURAHAN
WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Sri Yulanda Pratiwi

19520126

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**RELASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN WISATA PULESARI KALURAHAN
WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan S1 (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Di susun Oleh:

SRI YULANDA PRATIWI

NIM: 19520126

YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Februari 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Ketua Penguji/ Pembimbing
Ir. Nelly Tiurmida, MPA

2. Penguji samping I
Utami Sulistiana, S.P., M.P

3. Penguji Samping II
Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yulanda Pratiwi

NIM : 19520126

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"RELASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PULESARI KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Sri Yulanda Pratiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan berkat serta kasih setia-Nya, sehinggakan penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“RELASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PULESARI KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.IP pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadarinya sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta;
3. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing, dan memberikan masukan-masukan serta nasehat yang sangat memotivasi dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
5. Seluruh Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi ijin

untuk melakukan penelitian;

6. Bapak Fx. Musiarto dan Ibu Suhartini selaku orang tua tercinta yang selalu mendukung, Memotivasi dan mendoakan saya selama masa Pendidikan;
7. Ema Suryani dan Desi Puspa Haryani selaku Kakak terkasih yang mendoakan dan memotivasi selama masa pendidikan;
8. Pihak lainnya, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang tidak disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dibutuhkan segala kritik dan saran yang proporsional dan bertanggung jawab demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademis, praktisi, organisasi, dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Sri Yulanda Pratiwi

MOTTO

“Bawalah nama Tuhan di dalam proses mu, maka kamu akan di berkati”

***“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita”***

(Efesus 20:5 TB)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa, karena telah memberikan kesehatan, rahmat dan berkat serta kasih Karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga sudah sampai dititik ini, hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menemani saya sepanjang waktu
2. Bapak Fx. Musiarto dan Ibu Suhartini selaku orang tua dan anugrah dari Tuhan yang paling saya syukuri. Terima Kasih untuk semuanya, tidak ada takaran untuk cinta dan kasih yang kalian berikan. Terima Kasih yang tiada berkesudahan Kepada Tuhan Yesus, karena saya dihadirkan ditengah kedua pasangan suami, istri yang luar biasa ini.
3. Kakak saya Desi Puspa Hariyani dan Ema Suryani yang telah membantu baik dari segi finansial, nasihat, serta motivasi. Di usia yang jauh berbeda, kalian dengan sabar memahami dan berusaha bisa menyesuaikan diri dengan saya. Kalian luar biasa kak, banyak terima kasih dari adek.
4. Ipar saya Fran dan Aldi terima kasih sudah menjadi ipar yang baik, terima kasih sudah membantu proses saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Keponakan saya Kresensia Angela, Fernando Saputra, Brayen Kharel, Steven. Terima kasih telah memberikan semangat dan hiburan ditengah-tengah kesibukan sekolah kalian.
6. Keluarga besar yang selalu mendukung saya, yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
7. Laki-laki Sarjana Teknik pemilik NIM 2016013071 terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu untuk saling bertukar

pikiran dan kesabaran mendengarkan keluh kesah saya selama pengerjaan skripsi.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang.

8. Kae heri yang menjadi teman diskusi sekaligus panutan saya selama menempuh pendidikan di STPMD"APMD" Yogyakarta. Banyak terima kasih kae, banyak masukan-masukan yang sangat berguna buat diri saya.
9. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saya bersyukur mendapatkan bimbingannya, beliau betul-betul berada disisi kita sebagai pembimbing, bukan mengurui. Terima kasih banyak ibu atas saran dan masukannya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh studi di kampus tercinta STPMD"APMD" Yogyakarta.
11. Staf Kampus yang sudah melayani saya dengan baik selama saya menempuh pendidikan di Kampus STPMD"APMD" Yogyakarta.
12. Teman-teman organisasi KESA yang sudah menjadi wadah untuk bertukar pikiran, dan menjadi teman diskusi yang baik selama saya berkuliah di jogja.
13. Teman-Teman UKM Bola Voli karena sudah menjadi teman bermain di tengah kesibukan kuliah tetapi kita masih menyempatkan waktu untuk bermain bersama di lapangan voli.
14. Sahabat baik saya Augustirada yang selalu mendukung dan memotivasi saya selama ini.
15. Teman-teman, sahabat, keluarga selama di Yogyakarta (Carles, Natalia Dewi Pandong, kak desi, kak langga, mba sella, mba selli, mba Dessy, Kak naora, Kamelia Tessy). Terima kasih banyak telah mendukung saya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
INTISARI	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Literature Review.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	15
G. Fokus Penelitian.....	25
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Unit Analisis	26

a) Objek Penelitian.....	27
b) Subjek Penelitian	27
c) Lokasi Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
a) Observasi.....	29
b) Wawancara.....	29
c) Dokumentasi	30
4. Teknik Analisis Data.....	30
a) Reduksi Data.....	31
b) Penyaji Data	31
c) Penarikan Kesimpulan	31
BAB II PROFIL KALURAHANAN WONOKERTO	32
A. Sejarah Kalurahan Wonokerto.....	32
B. Visi dan Misi.....	32
C. Kondisi Geografis	35
1. Batas Wilayah	35
2. Luas Wilayah	37
D. Kondisi Demografi.....	39
1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	40
3. Data Penduduk Menurut Mata Pencarian	42
E. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kalurahan Wonokerto	43
1. Kondisi Sosial	43
2. Kondisi Ekonomi	44
F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Wonokerto.....	46

1. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	46
G. Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto	47
1. Tugas dan Fungsi Lurah.....	48
2. Tugas dan Fungsi Carik	48
3. Tugas dan Fungsi Jogoboyo.....	49
4. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu.....	50
5. Tugas dan Fungsi Kamituwo	50
6. Tugas dan Fungsi Danarto	50
7. Tugas dan Fungsi Toto Laksono.....	50
8. Tugas dan Fungsi Pangripto.....	51
9. Tugas dan Fungsi Dukuh	51
a. Struktur Pemerintah Kalurahan Wonokerto.....	52
H. Struktur BPKal Wonokerto.....	53
I. Profil Desa Wisata Pulesari	55
1. Titik Koordinat.....	55
2. Sekretariat Desa Wisata Pulesari	55
3. Sejarah Desa Wisata Pulesari.....	56
4. Letak Administratif, Demografi dan Geografi.....	56
5. Struktur Lembaga/Organisasi	58
6. Logo dan Arti Desa Wisata.....	59
7. Peta Potensi Desa Wisata Pulesari	60
a. Potensi Seni Pentunjukan Kerakyatan dan Kebudayaan	61
b. Potensi Alam.....	63
c. Potensi Pendukung Wisata.....	64
8. Slogan Desa Wisata Pulesari	66

9. Visi dan Misi.....	66
10. Data Pemandu Wisata	67
BAB III HASIL dan PEMBAHASAN	71
A. Interaksi Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pulesari.....	74
B. Model Pengembangan Wisata Pulesari	87
C. Kendala-Kendala dalam Pengembangan Wisata Pulesari.....	97
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
PEDOMAN WAWANCARA	111
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Deskripsi Informan	28
Tabel II.1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT	37
Tabel II.2 Penggunaan Lahan Kalurahan Wonokerto.....	39
Tabel II.3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel II.4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel II.5 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
Tabel II.6 Data Kelompok Kemasyarakatan.....	44
Tabel II.7 Sebaran Fasilitas Ekonomi Kalurahan Wonokerto	45
Tabel II.8 Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	46
Tabel II.9 Penggunaan Lahan Dusun Pulesari	53
Tabel II.10 Daftar Kelompok Pemandu Wisata.....	64
Tabel II.11 Daftar Kelompok Pemandu Wisata Karang Taruna.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto	49
Bagan II.2 Struktur BPKal Wonokerto	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Sekretariat Wisata Pulesari.....	51
Gambar II.2 Logo dan Arti Desa Wisata	55
Gambar II.3 Peta Potensi Desa Wisata	56
Gambar II.4 Kubro Siswo	57
Gambar II.5 Tari Salak	57
Gambar II.6 Bergodo/Prajurit	58
Gambar II.7 Bobbyok Sari dan Kienting Sari.....	58
Gambar II.8 Tracking Sungai	59
Gambar II.9 View Gunung Merapi	59
Gambar II.10 Makam Ziarah Ny. Pulesari.....	60
Gambar II.11 Kuliner.....	60
Gambar II.12 Home Stay	61
Gambar II.13 Membatik.....	61
Gambar II.14 Pondopo.....	62

INTISARI

Pengembangan Wisata Pulesari yang menggunakan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat tampaknya mengandung hal yang kontradiktif. Slogan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat memperlihatkan sisi kontradiktif itu. Di satu sisi, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memperlihatkan antusiasme warga. Di sisi lain, slogan tersebut memperlihatkan antusiasme warga yang kelewatan. Saking semangatnya, mereka sampai mengambil alih peran negara. Model pembangunan seperti ini mereduksi makna desa hanya sekadar masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Lurah, Pangripto, BPKal Wonokerto, Ketua Pengelola dan masyarakat Desa Wisata Pulesari. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, relasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari bersifat dominatif. Hal ini ditandai dengan sikap eksklusif masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Masyarakat enggan melibatkan Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam pengembangan Wisata Pulesari. *Kedua*, pengembangan Wisata Pulesari menggunakan model *community-based tourism*. Pengembangan wisata dengan model ini menekankan partisipasi masyarakat. Dalam model ini, masyarakat diberi keleluasaan untuk mengartikulasikan ide dan prakarsa dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. *Ketiga*, sejauh ini pengembangan Wisata Pulesari dihadapkan pada dua kendala utama yaitu sempitnya pemasaran produk dan sumber daya manusia yang belum mumpuni.

Kata Kunci: Relasi, Pemerintah Kalurahan, dan Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Pulau-pulau tersebut memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah dan potensi serta memiliki keanekaragaman bahasa, agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Kekayaan alam dan budaya dapat mendukung perkembangan industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut Suwanto (2004: 35-36), apabila dilihat dari aspek ekonomi, sektor pariwisata diharapkan menjadi penghasil devisa. Selain itu, pariwisata dapat menjadi sarana untuk mengurangi pengangguran. Dengan demikian, pariwisata mampu berkontribusi dalam pembangunan suatu wilayah.

Karakteristik SDA dan masyarakat Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai potensi wisata. Potensi wisata akan mendatangkan wisatawan baik tingkat lokal maupun mancanegara. Mengingat dampaknya yang signifikan dalam menunjang perekonomian, maka pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Menurut Simamora dan Sinaga (2016: 107), pengembangan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional. Pariwisata dapat memacu pertumbuhan ekonomi di

kawasan sekitar objek wisata tersebut. Pembangunan pariwisata tidak hanya dilakukan di tingkat nasional maupun daerah, tetapi dapat juga dilakukan oleh tingkat pedesaan yang biasanya disebut desa wisata.

Peraturan Menteri Budaya Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/KP/2010 Tahun 2010 menyatakan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pembangunan Desa Wisata tidak bisa lepas dari kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut (Rahmasari dan Pudjowati, 2017: 603). Dengan mengangkat potensi di setiap daerah, maka desa wisata akan menarik wisatawan dan mempunyai ciri khas.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah desa wisata di Indonesia adalah 1.734. Desa wisata sendiri bisa dikatakan cerminan keaslian pedesaan baik itu dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, dan juga memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komponen pendukung pariwisata. Peluang besar untuk desa wisata adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa kemudian dikelola dalam bentuk pariwisata. Pengembangan sektor wisata harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, seperti: promosi wisata, fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi, dan tempat penginapan.

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata. Itulah sebabnya Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, tetapi juga sebagai kota wisata. Dengan status ini, ide-ide kreatif dalam

menghadirkan dan mengembangkan berbagai kegiatan wisata terus mengalir. Ide-ide kreatif tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, namun juga muncul dari gagasan masyarakat desa.

Wisata Pulesari yang terletak di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu desa wisata yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan tersebut, Wisata Pulesari sudah terdaftar sebagai salah satu destinasi wisata di Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Wisata Pulesari merupakan desa wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Desa Wisata Pulesari mengalami perkembangan yang pesat sejak diresmikan pada 9 November 2012. Banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke wisata ini membuat Pulesari mendapatkan beberapa penghargaan dalam berbagai event bergengsi dalam bidang pariwisata. Penghargaan terakhir yang didapat oleh Wisata Pulesari adalah saat mengikuti pagelaran Festival Wisata pada tahun 2018 yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Dalam pagelaran ini, Desa Wisata Pulesari memenangkan penghargaan untuk kategori Wisata Mandiri.

Pembangunan pariwisata di Wisata Pulesari menggunakan model pembangunan berbasis masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*). Pembangunan berbasis masyarakat merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Dengan kalimat lain, *Community Based Tourism* merupakan model pembangunan yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan

seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam *Community Based Tourism*, peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata.

Masyarakat Pulesari memaknai musyawarah dan gotong royong dengan mengusung konsep dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan aset wisata bersama yang dimiliki, semua pihak sadar akan perannya masing-masing dalam memajukan pariwisata di Pulesari. Selain sebagai inisiator, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari adalah menjadi penjaga tiket retribusi, sebagai pemandu untuk kegiatan *outbond*, pemandu dalam kegiatan panen salak atau membuat olahan berbahan dasar salak, serta pemandu dalam kegiatan kebudayaan, menyediakan akomodasi atau layanan penginapan, membantu penyiapan api unggun jika terdapat kegiatan.

Jika dilihat sepintas, deskripsi pembangunan Wisata Pulesari memang dapat dikatakan ideal dengan menganut paradigma baru yaitu mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan proses perumusan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat Pulesari. Dengan partisipasi masyarakat tersebut, terdapat apresiasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat setempat. Selain itu, pembentukan Wisata Pulesari ditopang oleh aset sumber daya alam dan modal sosial (*social capital*) yang telah dimiliki dan disepakati masyarakat. Sumber daya alam dan modal sosial ini digunakan untuk menghidupkan tradisi budaya mereka. Dengan kalimat lain, masyarakat Pulesari menjadikan kebudayaan, seni dan tradisi sebagai basis pengembangan dan kemudian diarahkan sebagai

modal budaya (*culture capital*) yang menjadi ciri khusus atau karakter bagi masyarakat Pulesari.

Namun, cerita sukses pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Pulesari tampaknya mengandung hal yang kontradiktif. Slogan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat memperlihatkan sisi kontradiktif itu. Di satu sisi, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat memperlihatkan antusiasme warga. Di sisi lain, slogan tersebut memperlihatkan semangat warga yang kelewatan. Karena terlalu semangatnya, sampai mereka harus mengambil alih peran negara. Kalau pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan potensi desa, maka jawabnya: itu tanggung jawab bersama, harus ada partisipasi masyarakat. Ini bukti negara tidak hadir, atau melepas tanggung jawab.

Model relasi seperti ini merupakan manifestasi dari cara pandang libertarian yang hanya memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini pada gilirannya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa. Cara pandang ini tidak memiliki imajinasi tentang desa sebagai “negara kecil”. Jadi, dalam cara pandang dan praktik seperti ini, desa tidak tampil sebagai kesatuan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul “Relasi Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Pulesari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari?
2. Mengapa masyarakat tidak melibatkan pemerintah kalurahan dalam pengembangan wisata Pulesari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan relasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari.
2. Menjelaskan alasan di balik peminggiran pemerintah kalurahan oleh masyarakat dalam pengembangan wisata Pulesari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi-studi mengenai interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan Wonokerto dan masyarakat agar mengembangkan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan potensi kalurahan.

E. Literature Review

Penelitian mengenai relasi kuasa antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat bukan menjadi sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mencoba mengungkapkan relasi kuasa antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Armela Shintani yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, Volume 9, Issue 2, 2020 yang berjudul *Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong, interaksi ketiga *stakeholder* adalah sebagai berikut: pemerintah sebagai fasilitator, swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa, dan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas penginapan seperti villa. Namun peran ini belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata sebagai bentuk kepedulian akan adanya potensi pariwisata di daerahnya serta pengelolaan tempat wisata Sei Gohong. Meskipun demikian, Kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta di Sei Gohong dalam pengelolaan wisata masih belum diterapkan secara maksimal. Hal ini terjadi karena ada pengusaha (swasta) yang belum terlibat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong. Saat ini, pengelolaan destinasi wisata Sei Gohong dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata.

Kedua, penelitian Ketut Agus Gita Suprpta dan Gusti Agung Oka Mahagangga yang dimuat dalam Jurnal Destinasi Pariwisata Volume 5, Nomor 1, 2017 yang berjudul *Relasi Antara Investor Pariwisata dengan Masyarakat Lokal di Desa Pakraman Laplapan Desa Petulu, Kecamatan Ubud: Studi Kasus Konflik Sosial*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pakraman Laplapan merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan pariwisata Ubud. Desa Pakraman memiliki corak hubungan yang konfliktual dengan investor. Hal ini ditandai dengan regulasi yang diberikan kepada investor yang kurang rasional. Adapun faktor yang memicu terjadinya konflik antara investor pariwisata dengan masyarakat lokal di Desa Pakraman Laplapan khususnya petani pemilik lahan adalah faktor ekonomi. Dalam konflik ini, masyarakat mencoba merebut sumber daya ekonomi yang terbatas yang dimiliki oleh investor pariwisata. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan dari Desa Pakraman Laplapan kepada investor untuk memberdayakan masyarakat lokal sebesar 40% dari total karyawan.

Ketiga, penelitian Rina Widiastuti dan Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi yang dimuat dalam Jurnal Gama Societa Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 yang berjudul *Wacana dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dominan dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul adalah wacana pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat. Meskipun OPW dan BUMDes menggunakan wacana yang sama, tetapi keduanya memiliki praktik wacana yang berbeda. Sejak 2017, BUMDes mulai menempati posisi yang

berpengaruh dan dominan dalam hal pengambilan keputusan, praktik, dan implementasi strategi pembangunan. Di permukaan, OPW sepertinya bersedia bekerja sama dan mengikuti kebijakan BUMDes, tetapi praktik wacana mereka menggambarkan bahwa ada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap organisasi baru ini. Relasi kuasa antara OPW dan BUMDes Maju Mandiri merupakan relasi yang saling mendominasi. Relasinya cenderung setara, namun berada pada praktik wacana yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma berpikir dan tindakan yang saling berselisih satu dengan yang lain, karena ada mode objektifikasi secara terus menerus. Perbedaan manifestasi kekuasaan dalam praktik wacana inilah yang menyebabkan konflik tidak bisa benar-benar terselesaikan. Ada beberapa implikasi praktis yang bisa diambil dari hasil penelitian ini. Pertama, konsep pengelolaan Goa Pindul perlu diatur ulang. Konsep tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu diterapkan dalam proses tersebut. Ini adalah saatnya kembali pada wacana pemberdayaan masyarakat yang menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, berkeadilan, dan memperhatikan kelestarian alam, khususnya ekosistem Goa Pindul. Membangun ulang wacana pembangunan wisata Goa Pindul dan mempraktikannya bersama-sama akan menghindari para agen dari konflik yang berkepanjangan. Kedua, OPW dan BUMDes perlu lebih banyak menggunakan pendekatan kultural untuk mengkomunikasikan pemikiran dan kebijakannya agar lebih bisa dipahami dan diterima oleh satu sama lain, daripada menggunakan pendekatan struktural dan hukum. Ketiga, pemerintah di tingkat desa dan kabupaten bisa bertindak sebagai mediator antara BUMDes dan OPW

untuk menyeimbangkan relasi kuasa di antara mereka sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak bersikap pragmatis terhadap situasi di Goa Pindul. Keempat, upaya mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat di Bejiharjo sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan agar industri pariwisata bisa berjalan lebih sehat. Secara keseluruhan, meskipun kunjungan wisatawan ke Goa Pindul masih cukup tinggi, dari segi keberlanjutan daya tarik wisata sangat bergantung pada berbagai penataan kelembagaan. Relasi antar agen pembangunan pariwisata yang setara, meskipun sulit diciptakan, tetapi hal ini perlu diupayakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan pariwisata bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Bejiharjo.

Keempat, penelitian Ummu Habibah Gaffar yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan Volume 10, Issue 2, 2021 yang berjudul *Relasi Aktor Governance dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 tidak hanya melibatkan pemerintah. Namun, telah melibatkan banyak aktor, *civil society* dan swasta sebagai aktor yang melengkapi peran pemerintah. Kedua aktor ini, meskipun tidak terlalu dominan tetapi perannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. *Civil society* mengambil peran yang cukup sentral. Membangun solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu agar masyarakat terdampak Covi-19. Sementara aktor lainnya swasta, ikut merealisasikan kebijakan pemerintah di antaranya dengan mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan aktivitas jam operasional kantor. Yang menarik dari temuan ini yaitu berbagai aktor yang terlibat dalam

penanganan Covid-19 justru berangkat dari motif dan dorongan yang berbeda. Tetapi, ketiga aktor masih bisa bersinergi. Tidak menimbulkan konflik sebagaimana yang banyak dilihat di tempat lain bahwa pertemuan antara berbagai aktor justru akan membuat konflik terbuka semakin besar. Alih-alih mencapai kesepakatan yang sama justru keberadaan berbagai aktor dengan motif yang berbeda dapat memicu konflik. Kebalikan dari temuan ini, justru temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan motif dan dorongan yang ada pada masing-masing aktor tidak menimbulkan potensi konflik. Melainkan ada kesamaan yang terbangun antara ketiga aktor tersebut. Persamaan menjadi irisan yang mengeliminasi konflik tersebut karena adanya tujuan bersama yang ingin di wujudkan, yaitu melawan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kelima, penelitian Dona Fauziah yang dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 4, Nomor 1, Februari 2017 yang berjudul *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasa dan pengusaha membentuk hubungan yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Beberapa pihak aktor mengetahui tetap berjalannya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) ini seperti

Bupati, Dinas ESDM, Polres Kuansing, Anggota DPRD namun kegiatan masyarakat penambang masih tetap berjalan, ini menunjukkan bahwa penertiban PETI yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 ini belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Dampak relasi yang terjadi sangat banyak negatifnya pada positif. Dimana dampak PETI sangat merusak lingkungan, tantanan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.

Keenam, penelitian Irwan Sardi yang dimuat dalam Jurnal Analisa Sosiologi Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017 yang berjudul *Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan relasi kuasa dan modal yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha, dapat dilihat dalam beberapa poin, yaitu: 1) Hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumentalitas atas dasar untung rugi yang terjadi di antara keduanya. Hal itu berhubungan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Nangka. Di satu sisi, pengusaha berupaya untuk mendapatkan lahan masyarakat untuk mencapai keinginan mereka membuka perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, aparat desa memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan dan biaya ganti lahan kepada masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi proses awal dalam hubungan yang dilakukan. Akibat dari hubungan itu adalah praktik negosiasi dan manipulasi terstruktur yang digunakan oleh aparat desa untuk menindas masyarakat melalui kebijakan yang telah mereka

sepakati tanpa adanya partisipasi dan sosialisasi sebagai salah satu elemen penentu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan relasi dan praktik kompromis antara penguasa dan pengusaha telah melahirkan hubungan simbiosis mutualistik. 2) Pola kekuasaan yang diterapkan oleh aparat Desa Nangka adalah pola kekuasaan yang otoriter yang terwujud dalam logika dominasi sebagai wadah aparat desa dalam mengarahkan masyarakat menjadi satu dimensi dari kebijakan yang mereka buat dengan pihak perusahaan. Kemudian pola-pola tersebut mempengaruhi aparat desa dalam bersikap membuat kebijakan tanpa partisipasi dan hanya atas keuntungan pribadi, yang menghilangkan eksistensi masyarakat Desa Nangka untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, pola kekuasaan otoriter yang dijalankan oleh aparat desa melahirkan konflik di dalam masyarakat. Dari keadaan itulah membuat masyarakat untuk melakukan perlawanan. 3) Perlawanan yang telah dilakukan masyarakat akhirnya melahirkan integrasi kelompok dan pembentukan solidaritas antara sesama individu yang tertindas oleh kebijakan yang tidak memihak. Integrasi yang mereka lakukan adalah melalui pembentukan suatu forum yang bernama Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka (FPLDN). FPLDN merupakan forum yang digunakan untuk melawan aparat desa sekaligus sebagai alat untuk dapat menciptakan perubahan dan akhirnya tercipta kerajaan dimana manusia menjadi tuan atas dirinya dan kerja sebagai permainan.

Secara umum, keenam penelitian di atas mengarahkan perhatian pada relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan publik. Pada umumnya, penelitian terdahulu tentang relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat yang menonjol adalah pola relasi dominatif yaitu relasi kuasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini semakin memberi penekanan bahwa kekuasaan hanya terpusat pada institusi pemerintahan dan tidak menyebar ke dalam diri setiap individu atau kelompok seperti yang dibayangkan oleh pemikir pasca-struktural. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti berusaha untuk memperbaharui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Maksudnya, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan relasi kuasa antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik dan pengelolaan potensi kabupaten. Tetapi, penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap mengenai keengganan masyarakat melibatkan pemerintah kabupaten dalam pengembangan objek wisata. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengungkapkan bentuk relasi yang lain antara pemerintah kabupaten dan masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dipandu oleh perspektif *Governance* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* yang diajarkan oleh pemikir-pemikir neoliberal. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun “*good governance*”. Duamantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”. Selain itu, secara keilmuan, kedua mantra ini tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M. Ramesh (2005: 15) meyerukan “*bringing government back in*” untuk merepons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi resiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau perspektif tanpa basis empiris yang memadai.

Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pengertian meta-governance yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Jadi, *governance* dalam penelitian ini bukan berbicara tentang “*governance without government*”, melainkan “*government with governance*”. Jika mengikuti logika Mazhab Timoho, secara sederhana, *governance* berbicara tentang interaksi atau relasi antara pemerintah dengan pihak luar. Pemerintah tanpa *governance* atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya, “*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (Sutoro Eko, 2021: 15).

Menurut *governance*, pemerintahan adalah proses interaksi dan proses konstitutif antara pemerintah dengan masyarakat (politik, ekonomi, sipil) agar tidak terjebak pada pemerintahan sebagai perkantoran. Konsep *governance* dipahami sebagai tata pemerintahan yang di antaranya adalah interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (Sutoro Eko, 2020: 1). *Governance* adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Konsep *governance* merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan dengan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun warga masyarakat. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, responsivitas, rente, privatisasi, rente, *free rider*, dan bandit (Sutoro Eko, 2020: 2).

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata. Dalam pengembangan objek wisata, pemerintah dan masyarakat dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu, pengembangan objek wisata memerlukan partisipasi antarsektor terutama pemerintah dan masyarakat.

Pada umumnya, pengembangan objek wisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Sutoro Eko (202: 12), pemerintah (*Government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021: 4) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah. Karena secara *de facto* ada banyak subjek yang memerintah, seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1994: 4), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mengacu pada subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif. *Kedua*,

pemerintah dan predikat dan objek. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor bupati, tetapi kata “apa” sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan, misalnya; berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam-macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa” yang diperintah adalah negara, warga, dan masyarakat. Lalu, kata “di mana” menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara, dan dunia.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat (*local self government*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekedar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan proteksi kepada warga sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Levi, 2006: 6).

Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak-kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekedar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak

berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi, dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

Pemerintah merupakan salah satu elemen dari negara. Artinya, pemerintah menjadi bagian dari negara. Pemerintah merupakan sebagai aktor-insitusi yang menyelenggarakan negara. Hal yang paling fundamental harus dipahami adalah pemerintah dan negara merupakan dua insitusi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, silih berganti secara berkala sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan pecah-pecah. Pemerintah jika diartikan adalah sebagai insitusi dan arena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam negara modern, pemerintah sering diartikan sebagai otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Tugas pemerintah adalah memerintah negara, agar negara melindungi dan melayani warganya. Secara esensial pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah rakyatnya. Contohnya, pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat.

Pemerintah sejatinya merupakan aktor-insitisi yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Dengan mengikuti penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah kalurahan adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah kalurahan mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat

kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, pada umumnya, pengembangan objek wisata merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah kalurahan. Akan tetapi, ketika kebutuhan masyarakat akan pelayanan pariwisata semakin meningkat, hal tersebut tidak diimbangi oleh peran pemerintah. Dalam banyak hal, pemerintah mengalami keterbatasan untuk mengelola potensi wisata. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan sangat diperlukan.

Pada saat ini, pembangunan sektor pariwisata telah menjadi salah satu primadona pemerintah termasuk pemerintah kalurahan. Pendekatan yang dipakai dalam pembangunan pariwisata adalah pembangua pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan wisata dengan memperhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi jangka panjang. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan estetika serta menjaga keutuhan ekologi, keanekaragaman hayati, budaya dan sistem kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata memerlukan partisipasi dari setiap elemen termasuk masyarakat. Pembangunan pariwisata akan berhasil apabila melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal

baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya (Hamidah, 2013: 191). Dengan kalimat lain, pengelolaan potensi wisata akan maksimal apabila ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencapai keputusan kolektif. Dengan kolaborasi, hubungan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat semakin dekat, komunikasi semakin intensif, serta mengaburkan batas-batas organisasi (Fairuza, 2017: 193). Jadi, pengembangan objek wisata membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain terutama masyarakat agar dapat mencapai tujuan bersama.

Kolaborasi dalam pengembangan objek wisata akan memunculkan inisiatif pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk membentuk desa wisata. Desa wisata sendiri dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi yang menjadi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Pembentukan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan dapat bersinergi dan bermitra dengan aktor lainnya terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah dengan membangun dan menumbuhkan sikap positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona.

Desa wisata berfungsi sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi tempat sebagai tempat wisata. Untuk mengetahui potensi wisata desa yang ada, maka pihak desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat

membantuk lokasi wisata nantinya. Halini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan data dan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga.

Dalam pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kepariwisataan. Tanpa partisipasi masyarakat, pengembangan desa wisata akan kehilangan maknanya. Di Desa Wisata Pulesari, masyarakat terlibat dalam pengembangan objek wisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan kelompok yang dibentuk sendiri oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan objek wisata yang ada agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Pada umumnya, pengembangan objek wisata dapat berjalan secara maksimal apabila antara pemerintah kalurahan dan masyarakat membentuk relasi kemitraan. Relasi kemitraan dapat terjadi jika di antara para pihak kepentingan mengembangkan sikap saling percaya (*mutual trust*). Sikap saling percaya dapat mendorong para pihak kepentingan untuk menyadari dan melaksanakan perannya masing-masing dalam pengembangan objek wisata. Dalam relasi kemitraan, pemerintah kalurahan mempunyai tugas untuk mendampingi, memfasilitasi, melindungi, dan mengarahkan masyarakat akan dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, masyarakat bertugas untuk menjaga, merawat, dan mengelola potensi wisata yang ada agar mampu

memberi manfaat bagi kalurahan. Notoatmodjo (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Raman, dkk (2015: 190) mengatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

Menurut Sugiyono (2017: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interaksi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari;
2. Model pengembangan Wisata Pulesari; dan
3. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Pulesari.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2002: 5), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metod penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola atau nilai bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002: 5). Selain itu, penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena hasil penelitian yang dipaparkan bersifat apa adanya. Jadi, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara kualitatif, tidak menggunakan besaran angka melainkan kata-kata dan hasilnya dipaparkan atau dideskripsikan apa adanya (Mukhtar, 2003: 15).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu, sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a) Objek Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2017: 229), objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka objek penelitian ini, yaitu: *Pertama*, tempat (*place*) adalah Wisata Pulesari, Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, pelaku (*actor*) adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto dan masyarakat Padukuhan Pulesari. *Ketiga*, aktivitas (*activities*) adalah pengembangan Wisata Pulesari yang meliputi perencanaan (*planning*), pengarahan (*directing*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*). Jadi, objek penelitian ini adalah pengembangan Wisata Pulesari oleh pemerintah dan masyarakat Kalurahan Wonokerto.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang

terdiri dari:

- 1) Lurah Kalurahan Wonokerto;
- 2) Pangripta (Kaur Perencanaan) Kalurahan Wonokerto;
- 3) BPKal Wonokerto (1 orang);
- 4) Anggota Pokdarwis (3 orang); dan
- 5) Masyarakat Desa Wisata Pulesari (4 orang).

Tabel I.I Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1	Riyanto Sulistyo Budi	Laki-laki	54	Lurah
2	Sutarjo	Laki-laki	58	Badan Permusyawaratan Kalurahan
3	Eko Wahyudi	Laki-laki	55	Pangripta
4	Sarjana	Laki-laki	50	Ketua Pengurus Wisata
5	Didik Irwanto	Laki-laki	37	Ketua Pengurus Wisata
6	Agus Suryanto	Laki-laki	31	Bendahara Pengurus Wisata
7	Ismanta	Perempuan	57	Masyarakat
8	Marto	Laki-laki	60	Masyarakat
9	Wahyuni	Perempuan	55	Masyarakat
10	Nuning	Perempuan	54	Masyarakat

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti

Tabel I.I menunjukkan nama-nama narasumber (Informan) yang menjadi subjek penelitian.

Narasumber yang dijadikan subjek penelitian ini merupakan Pemerintah Kalurahan, pengelola Desa Wisata Pulesari, dan Masyarakat Dusun Pulesari sendiri.

c) Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata. Selain itu, pengelolaan objek wisata ini terindikasi meminggirkan institusi pemerintah kalurahan karena pengembangan objek wisata mengilhami pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini akan

dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak November 2022-Januari 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia misalnya dari perpustakaan atau data yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a) Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyo 2012: 46). Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehknik observasi untuk mengamati kondisi awal di lokasi penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memperoleh data serta informasi dari terwawancara (Arikunto, 1993: 126). Wawancara memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, hasilnya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan sejarah pribadi, kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, atau autobiografi (Sugiyono 2017:124-125).

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:131) dalam penelitian kualitatif, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga semuanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis data:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017: 135) mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyaji Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20).

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti. Dengan cara verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan peneliti yang dicari selama proses penelitian

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Wonokerto adalah salah satu Kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yakni : Kalurahan Garongan , Ledok Lempong, Tunggul, dan Dadapan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahn Kalurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu Kalurahan Otonom dengan nama Kalurahan Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

Sejak tahun 1948 Pemerintah Kalurahan Wonokerto dipimpin diantaranya sebagai berikut :

- 1) M.Ng Radiyo Hadisugondo pada tahun 1948-1986;
- 2) Sastrodiharjo pada tahun 1964-1996;
- 3) H Suhartono pada tahun 1996-2004;
- 4) Kasidi , BA pada tahun 2004-2015;
- 5) Tomon Haryo, S.Sos pada tahun 2015-2021; dan
- 6) Riyanto Sulistyو Budi , SE pada tahun 2021-sekarang.

B. Visi dan Misi

Visi Kalurahan Wonokerto

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wonokerto Tahun 2021-2027 menetapkan Visi atau cita-cita yang ingin dicapai, yaitu :

Mewujudkan masyarakat Wonokerto yang relegius, adil dan makmur, mandiri, berbudaya, berdaya saing, maju dan sejahtera yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat Relegius

Maknanya bahwa Kalurahan Wonokerto ingin membangun masyarakat yang memiliki akhlakul kharimah berbudi pekerti dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama.

2. Adil dan Makmur

Adil adalah dimana masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, mendapatkan akses yang sama di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan Makmur adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

3. Masyarakat Mandiri

Masyarakat Kalurahan yang mandiri adalah masyarakat yang mempunyai akses kebutuhan dasar yang mencukupi, infrastuktur yang memadai, sarana transportasi yang baik dan fasilitas pelayanan publik yang baik.

4. Masyarakat Berbudaya

Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang mempunyai jati diri sebagai bangsa selalu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur yang dimiliki dan berkembang di masyarakat.

5. Maju dan Sejahtera

Masyarakat Wonokerto yang maju adalah masyarakat yang terbuka menerima perubahan akibat dari era informasi dan aktif kreatif memanfaatkan teknologi yang ada untuk kesejahteraan. Makna Masyarakat yang sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan

pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan menuju kehidupan yang berkualitas.

Misi Kalurahan Wonokerto

Misi Kalurahan Wonokerto merupakan penjabaran yang lebih operasional dari visi, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Kalurahan Wonokerto maka tersusunlah misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan : budi pekerti, keagamaan, informal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang trampil, cerdas, berbudi pekerti luhur, berahlak mulia dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif, bijaksana, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang kredibel, akuntabel, transparan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, tepat, akurat, efektif, efisien berbasis pada teknologi informasi.
5. Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai Kalurahan yang sejahtera, adil, dan makmur bertumpu pada tiga pilar yaitu; agroindustri, agrobisnis, dan agro wisata.
6. Membangun dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kondisi alam, seni dan budaya, pertanian dan industri kuliner.

7. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat Wonokerto yang maju dan berdaya saing.
8. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Wonokerto tentang mitigasi bencana untuk meminimalisir apabila terjadi bencana.

C. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis adalah kondisi suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Kalurahan Wonokerto merupakan Kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Batas Wilayah

Secara administrasi Kalurahan Wonokerto terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dengan batas :

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Girikerto, Taman Nasional Gunung Merapi
- b. Sebelah Selatan : Kalurahan Donokerto
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- d. Sebelah Timur : Kalurahan Girikerto.

Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Padukuhan yang terdiri dari 64 RT dan 29 RW diantara lain :

Tabel II.1
Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT

No	Nama Padukuhan	Nama Dukuh	Nama Dusun Kewilayahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tunggularum	Kristanto	Tunggularum	2	4
2	Gondoarum	Mustijo	Gondoarum	2	4
3	Sempu	Ridwan	Sempu, Tlatar, Kapingrejo, Balerante	2	7
4	Banjarsari	Supangat	Banjarsari, Arjosari, Ledok Lempong	3	5
5	Imorejo	Rahma Badawi	Ngangrung Lor, Nganggrung Kidul, Imorejo	2	4
6	Manggungsari	Tri Hartono	Manggungsari, Ngelodadi, Ngembesan	2	4
7	Jambusari	Rebatman	Jambusari, Banyuurip, Gondorejo Lor, Gondorejo Kidul	3	4
8	Dukuhsari	Ganjar Asmara	Dukuhsari, Sidosari	2	4
9	Kembang	Rahmma Hidayat	Kembang, Garongan	2	4
10	Pojok	Yayan Bintaro	Pojok, Garongan, Cepit, Projayan	2	4
11	Becici	Dhono Setiawan	Becici, Puntuk, Kopen, Pulesari	2	5

12	Dadapan	Sarmin	Dadapan, Selowangsan, Banjaran	3	6
13	Sangurejo	Sehadi	Kenteng, Sangurejo, Lungguhrejo, Keringan	2	5
Total				29	64

Sumber: Data Wilayah Kalurahan Wonokerto 2022

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa Dusun Pulesari terletak di Padukuhan Becici, yang dimana Padukuhan ini di pimpin oleh Dukuh Dhono Setiawan.

2. Luas Wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Wonokerto diketahui luas wilayah Kalurahan Wonokerto mencapai 1.547 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/petani, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun perinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2
Penggunaan Lahan Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan	Jenis Penggunaan Lahan								Jumlah
		Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Industri	Perkebunan	Permukiman	Perdagangan dan Jasa	Hutan	Lain-lain	
1	Tunggularum	5	80		40	44		17	4	190
2	Gondoarum	10	38		50	10				108
3	Sempu		1,2		34	51,3				86,5
4	Banjarsari	74	13,5		1,9	4,9				94,3
5	Manggungsari	4	20,5		53,5	8				86
6	Imorejo	25,3	5,4	1	1	31,5				64,2
7	Jambusari	37	10			2			1	50
8	Dukuhsari	36			10	9				55
9	Kembang	8			45	7,5	1			61,5
10	Pojok	5	2,7		14,6	21				43,3
11	Sangurejo	28	4			8				40
12	Becici	3,4	2,8	0,2	31,8	25,8	2,9			46,4
	Desa Wisata Pulesari									20,5
13	Dadapan	0,7	9		32,5	15				57,2
Total		236,4	187,1	1,2	314,3	238	3,9	17	5	1002,9
Persentase		23,57%	18,66%	0,12%	23,73%	0,39%	0,39%	1,70%	0,50%	100,00%

Sumber : Data Luas Wilayah Kalurahan Wonokerto 2022

Dari luasan wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto. Kalurahan Wonokerto berada di kaki/ lereng gunung merapi yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Wonokerto terletak pada ketinggian 400 s/d 900 m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah pertanian.

Kalurahan Wonokerto adalah daerah pertanian dengan sumber mata air 26 mata air mengalir ke beberapa sungai krasak, sungai bedog, dan sungai sempor, yang mencukupi kebutuhan irigrasi petani. Curah hujan rata-rata 3,908 mm pertahun dengan suhu 24°C s/d 28°C . sumber air yang mengalir di bawah permukaan berada di jalur mata air Turi – Sleman yang pemanfaatnya digunakan untuk sumber air bersih dan irigrasi. Namun, pada musim kemarau sebagian wilayah kekurangan air untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air minum sumber air tanah/sumur di Kalurahan Wonokerto masih tercukupi. Kondisi tanah di wilayah Kalurahan Wonokerto merupakan daerah perbukitan/pegunungan yang subur dengan struktur tanah yang merupakan tanah berpasir dan berbatu cadas.

D. Kondisi Demografi

Kondisi Demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuan.

Kalurahan Wonokerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.125 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.075 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 5.050 jiw a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.085 di Kalurahan Wonokerto. Penduduk Kalurahan Wonokerto tersebar di 13 Padukuhan, 29 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT).

1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel II.3
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Jumlah KK
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)		
1	Tunggularum	308	395	703	190
2	Gondoarum	288	295	583	194
3	Sempu	557	535	1092	362
4	Banjarsari	394	387	781	236
5	Manggungsari	337	359	696	229
6	Imorejo	335	314	649	185
7	Jambusari	354	358	722	219
8	Dukuhsari	362	312	674	200
9	Kembang	313	359	672	192
10	Pojok	340	285	625	187
11	Sangurejo	502	457	959	298
12	Becici	487	486	973	296
13	Dadapan	498	498	996	297
Total		5.075	5.050	10.125	3.085

Sumber: Data Profil Penduduk Kalurahan Wonokerto 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan seimbang dengan perbandingan laki-laki sebanyak 5.075 dan perempuan 5.050 dan Padukuhan Sempu merupakan penduduk terbanyak yakni 1092 dengan jumlah penduduk laki-laki 557 dan penduduk perempuan sebanyak 535 orang.

2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu barometer mengenai kesejahteraan. Kalurahan Wonokerto sendiri dalam peningkatan melek angka dan pemberantasan buta baca termasuk berhasil.

Tabel II.4
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1	Tidak Tamat SD	337	290	627
2	Tamat SD	942	899	1831
3	Tamat SLTP	988	1067	2055
4	Tamat SLTA	2496	2358	4854
5	Sarjana	312	446	758
Total		5.075	5.050	10.125

Sumber : Data Penduduk Kalurahan Wonokerto 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Wonokerto boleh dibilang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Hal ini memberi makna bahwa sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Kalurahan Wonokerto cukup memadai untuk menyokong pembangunan kalurahan. Jika SDM ini digunakan secara maksimal, niscaya Kalurahan Wonokerto akan bertumbuh menjadi entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

3. Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Berikut merupakan data penduduk berdasarkan mata pencapaian di Kalurahan Wonokerto

Tabel II.5
Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1	Pertanian	925	855	1.810
2	Pertambangan	57	17	74
3	Listrik dan Gas	33	19	52
4	Sektor Bangunan	589	188	777
5	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	360	287	647
6	Industri Pengolahan	70	36	106
7	Pengangkutan dan Komunikasi	110	130	240
8	Jasa Keuangan dan Persewaan	189	132	321
9	Sektor Wisata	520	125	645
10	Lain-lain	2.222	3.261	5.483
Total		5.075	5.050	10.125

Sumber : Data Penduduk Kalurahan Wonokerto 2022

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencapaian penduduk Kalurahan Wonokerto sangat bervariasi. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto bermata pencapaian petani. Hal ini berarti Kalurahan Wonokerto masih bertumpu pada sektor pertanian. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Kalurahan Wonokerto didominasi oleh lahan pertanian. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Wonokerto.

Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan buruh tani. Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik

perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset. Redistribusi aset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

E. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kalurahan Wonokerto

1. Kondisi Sosial

Banyak sekali kelompok kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Salah satunya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), adapun Kelompok tersebut di wilayah Kalurahan Wonokerto tersebar di beberapa Padukuhans sebagai berikut.

Tabel II.6
Data Kelompok Kemasyarakatan

No	Padukuhan	Nama Wisata
1	Tunggularum	Desa Wisata Tunggularum
2	Sempu	Desa Wisata Sempu dan Desa Wisata Tlatar
3	Sanggurejo	Desa Wisata Sanggurejo
4	Pojok	Desa Wisata Garongan
5	Becici	Desa Wisata Pulesari

Sumber : Data Kelompok Kemasyarakatan Kalurahan Wonokerto 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tersebarnya Pokdarwis ke dalam beberapa desa wisata menunjukkan bahwa Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu kalurahan yang menyimpan banyak potensi wisata. Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian, tanggung jawab, serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui

kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Adapun tujuan pembentukan Pokdarwis ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan kepariwisataan. *Kedua*, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata. Dengan demikian, Pokdarwis merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

2. Kondisi Ekonomi

Masyarakat yang berada di Kalurahan Wonokerto pada umumnya bekerja sebagai petani, khususnya petani salak. Penduduk di Desa Wonokerto tidak semuanya bekerja disektor pertanian, ada yang bekerja sebagai buruh kasar, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Karyawan Swasta, sektor wisata, dan lain-lain.

Tabel II.7
Sebaran Fasilitas Ekonomi Kalurahan Wonokerto

No	Padukuhan	Pasar Modern/Swalayan/Supermarket	Pasar Tradisional	Ruko	Toko	Warung/Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	1			3	6	1
2	Gondoarum	2		1	1	4	
3	Sempu	3	1		5	29	8
4	Banjarsari	2			3	8	2
5	Manggungsari					7	
6	Imorejo	2				8	
7	Jambusari	1				7	2
8	Dukuhsari					11	
9	Kembang		1			8	
10	Pojok	1				11	1
11	Sangurejo					4	4
12	Becici			8	14	13	
13	Dadapan	6				10	
Total		18	2	9	26	126	18

Sumber : Data Fasilitas Ekonomi Kalurahan Wonokerto

Dari fasilitas ekonomi di atas pasar tradisional dan warung/ kios memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari, dimana pengelola dapat menjual hasil Potensi pendukung Wisata Pulesari yaitu Kuliner Khas Desa Wisata Pulesari seperti oseng-oseng salak, sambel salak dan minuman jeaser.

F. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Wonokerto

1. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Tabel II.8

Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

No	Padukuhan	Kantor Balai Kalurahan	Balai Pertemuan	Kantor Dinas	Gardu Jaga	Radio/tv	Bengkel Kerja	Kantor KUA	Kantor Lain-lain
1	Tunggularum		1		4				
2	Gondorom				4				
3	Sempu				6	2			2
4	Banjarsari		1		3				
5	Manggungsari				2				
6	Imorejo	1	1		4				
7	Jambusari				4		4		
8	Dukuhsari				5		5		
9	Kembang		1		3		7		
10	Pojok				4		1		
11	Sangurejo			1	4		6	1	
12	Becici				8		2		
13	Dadapan				6		2		
Total		1	4	1	57	2	27	1	2

Sumber : Data Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kalurahan

Wonokerto 2022

Berdasarkan tabel di atas fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang di Kalurahan Wonokerto antara lain Kantor Balai Kalurahan yang terdapat di Padukuhan Imorejo, balai pertemuan berjumlah 4 yang terletak di Padukuhan Tunggurum, Banjarsari, Imorejo, dan Padukuhan Kembang. Kantor Dinas hanya terdapat di Kalurahan Pojok. Gardu Jaga berjumlah 57 yang tersebar di semua Padukuhan, bahkan 12 Padukuhan Memiliki lebih dari 1 Gardu Jaga. Radio/TV hanya terdapat di Padukuhan Sempu berjumlah 2 Tempat. Bengkel Kerja sebanyak 27 yang tersebar di 7 Padukuhan antara lain Padukuhan Jambusari, Dukuhsari, Kembang,

Pojok, Sangurejo, Becici, dan Padukuhan Dadapan. Kantor KUA hanya terdapat di Padukuhan Sangurejo. Kantor Lain-lain hanya terdapat di Padukuhan Gondoarum dengan jumlah 2 tempat.

G. Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kalurahan Wonokerto mengacu pada Perihal Organisasi Pemerintahan Desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan,

Pamong Kalurahan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Pelaksana Teknis;
3. Pelaksana Kewilayahan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Kepala Urusan Tata Laksana;
2. Kepala Urusan Dhanarto; dan
3. Kepala Urusan Pangripto.

Pelaksana Teknis terdiri dari :

1. Jogoboyo
2. Ulu-ulu
3. Kamituwo

Pelaksana kewilayahan dikepalai oleh seorang dukuh yang bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Padukuhan.

Berikut adalah uraian tentang tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan Wonokerto.

1. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Pagerharjo dipimpin oleh Riyanto Sulisty Budi. Sebagai Lurah, Riyanto Sulisty Budi bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Riyanto Sulisty Budi mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Riyanto Sulisty Budi meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Wonokerto, Riyanto Sulisty Budi juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Wonokerto. Carik

berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Wonokerto. Saat ini, Carik Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Samijo. Sebagai Carik, Samijo bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Jogoboyo

Jogoboyo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jogoboyo Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Didik Irwanto dan dibantu oleh seorang staf yaitu Danny Roesdhiana. Sebagai Jogoboyo, Didik Irwanto dan Danny Roesdhiana bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.

4. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Tauqid Armunanto dan dibantu oleh seorang staf yaitu Aditya Yosefin. Sebagai Ulu-Ulu, Tauqid Armunanto dan Aditya Yosefin bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

5. Tugas dan Fungsi Kamituwo

Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwo Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Baroji dan dibantu oleh seorang staf yaitu Agus Hardono. Sebagai Kamituwo, Baroji dan Agus Hardono bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

6. Tugas dan Fungsi Danarto

Danarto berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarto Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Septefi Dwi Prasetyo dan dibantu oleh seorang staf yaitu Feri Fitanto. Sebagai Danarto, Septefi Dwi Prasetyo dan Feri Fitanto bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

7. Tugas dan Fungsi Toto Laksono

Toto Laksono Kalurahan Wonokerto diemban oleh Fera Arista dan dibantu oleh seorang staf yaitu Sulastri. Sebagai Toto Laksono, Fera Arista dan Sulastri mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata

naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Toto Laksono bertugas membantu carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. .

8. Tugas dan Fungsi Pangripto

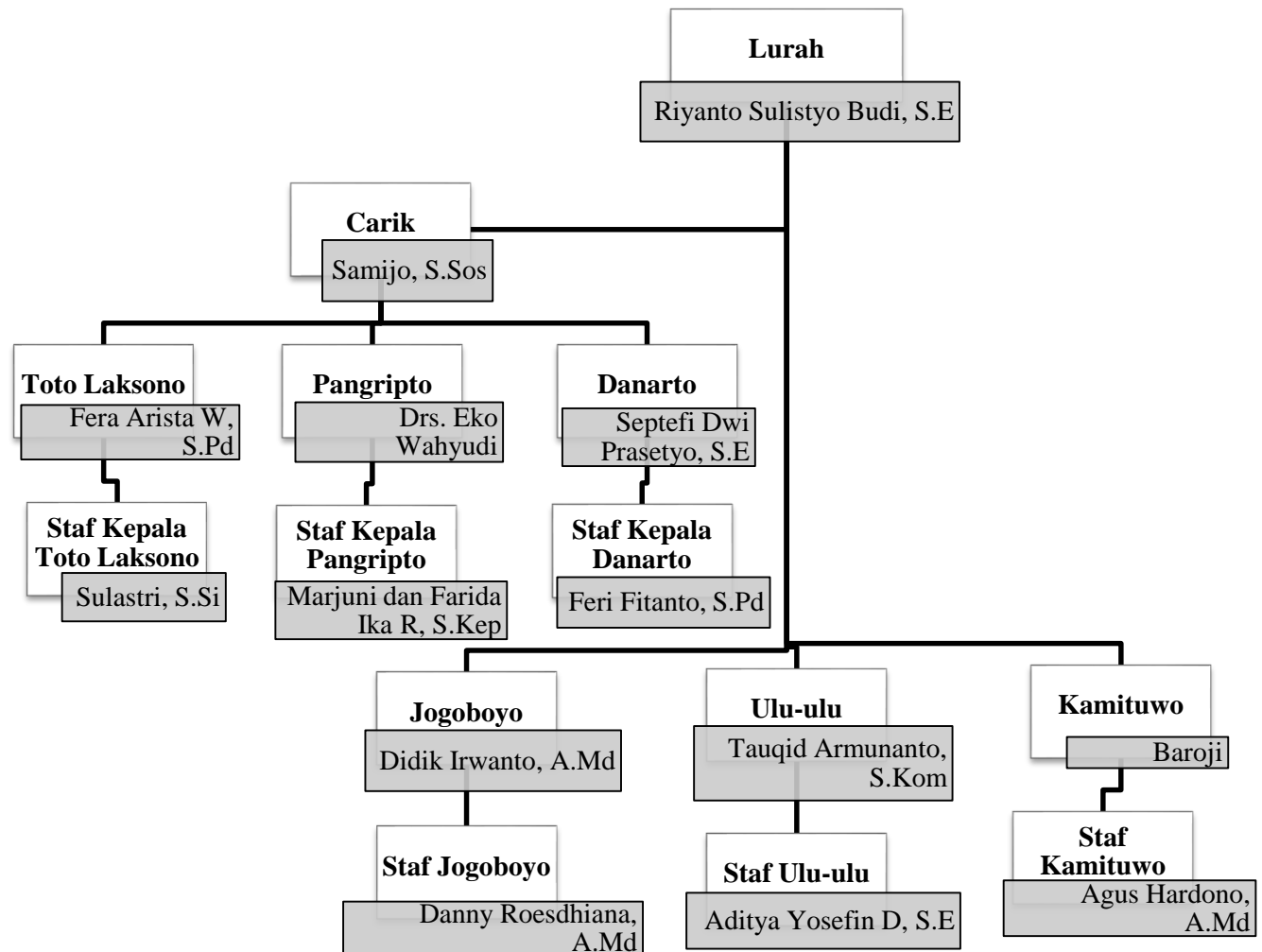
Pangripto berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripto Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Eko Wahyudi dan dibantu oleh dua orang staf yaitu Marjuni dan Farida Ika. Sebagai Pangripto, Eko Wahyudi, Marjuni, dan Farida Ika bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

9. Tugas dan Fungsi Dukuh

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-upayapemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

a. Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto

Bagan II.1
Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto



Sumber : Data Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto 2022

Bagan II.1 menunjukkan nama-nama pejabat Pemerintahan Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jabatan dan tugasnya masing-masing yang beranggotakan 17 orang. Struktur tersebut dilampirkan sebagaimana dimaksud untuk menunjukkan nama beserta jabatan dalam kursi Pemerintahan Kalurahan Wonokerto pada tahun 2022 hingga selesai masa jabatan

H. Struktur BPKal Wonokerto

Dalam menjalankan tugas, Lurah bersama Pamong Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). BPKal merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPKal merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPKal merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

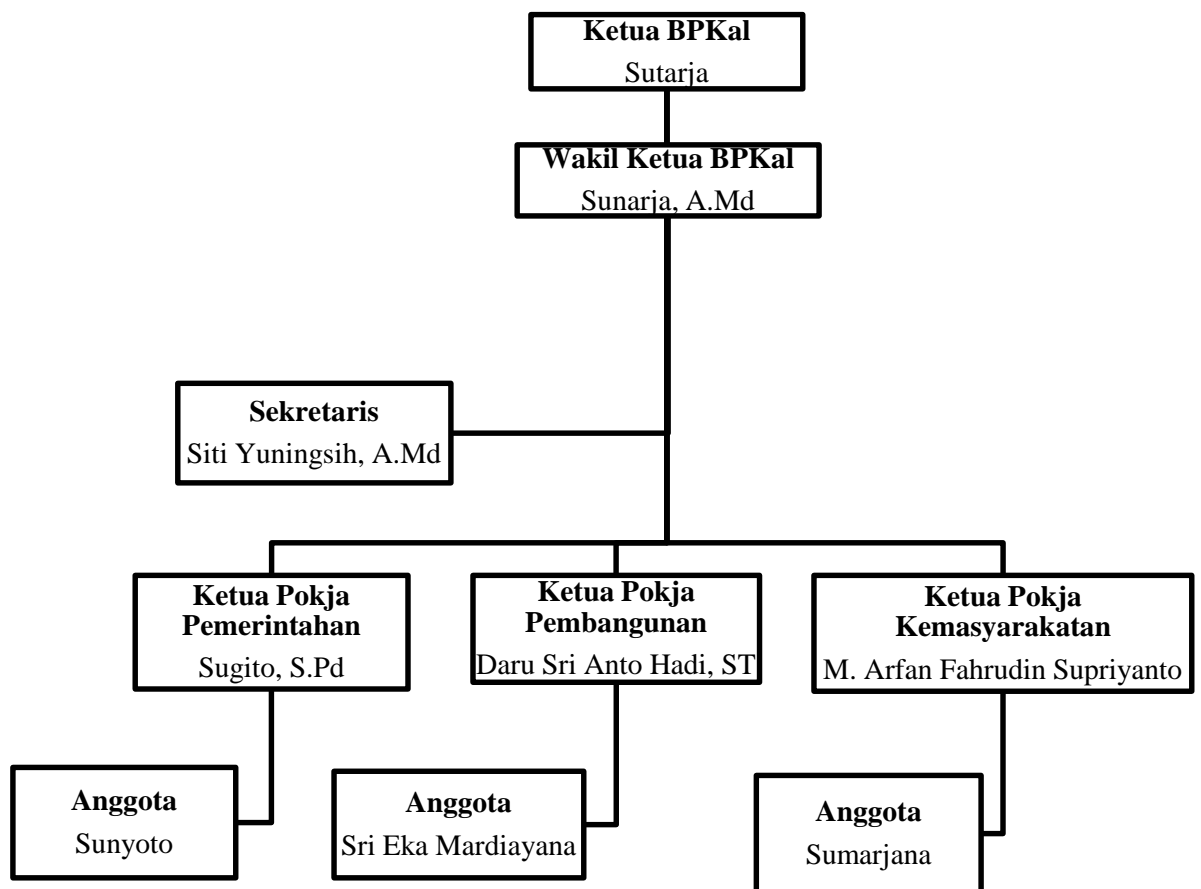
Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPKal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPKal merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPKal ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPKal relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPKal dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPKal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPKal berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPKal juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti bahwa eksklusi BPKal dan pelemahan fungsi hukum BPKal digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPKal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Lurah. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

Bagan II.2
Struktur BPKal Kalurahan Wonokerto



Sumber : Data Struktur BPKal Kalurahan Wonokerto 2022

Bagan II.2 menunjukkan Nama dan Jabatan BPKal yang di Ketui oleh Bapak Sutarja, wakilnya bapak Sunarja, dan Sekretarisnya ibu Siti Yuningsih. Selain itu ada Ketua Pokja Pemerintahan bapak Sugito dan anggotanya Sunyono, Ketua Pokja Pembangunan bapak Sugito dan anggotanya Sri Eka Mardiyana, Ketua Pokja Kemasyarakatan bapak Daru Sri Anto Hadi dan anggotanya Sumarjana.

I. Profil Desa Wisata Pulesari

1. Titik Koordinat

Dusun Pulesari berada titik koordinat 7°58'53.7 LS dan 110°22'24.0 BT

2. Sekretariat Desa Wisata Pulesari

Gambar II.1

Sekretariat Wisata Pulesari



Nama Dusun : Pulesari

Kalurahan : Wonokerto

Kapanewon : Turi

Kabupaten : Sleman

Provinsi : D.I. Yogyakarta

Kode Pos : 55551

Telp : 085743128969

Email : dewipule@gmail.com

Blog : www.Desawisatapulesari.wordpress.com

3. Sejarah Desa Wisata

Desa wisata ini merupakan desa wisata yang berdiri sendiri yang berawal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat berdasarkan semangat gotong royong membangun desa serta komitmen bersama dan banyaknya potensi yang ada di wilayah. Bagi masyarakat hal ini perlu di lestarikan dan dikembangkan, maka dari itu memunculkan sebuah ide atau gagasan untuk membentuk sebuah Desa Wisata. Awal mula merancang konsep pariwisata pada tanggal 26 Mei 2012 dan diresmikan sebagai Desa Wisata pada tanggal 9 November 2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupetn Sleman.

Desa Wisata ini menyajikan sebuah wisata Alam dan Budaya Tradisi, dalam artian Desa yang mempunyai potensi Alam yang luar biasa sehingga perlu untuk dilestarikan serta dikembangkan dan dimanfaatkan sewajarnya tanpa merubah sebuah esensi dari pada kawasab pedesaan. Budaya Tradisi merupakan wujud dari desa yang selalu melestarikan nilai-nilai Budaya yang ada di masyarakat agar tidak punah ditelan jaman modernisasi ini.

Desa Wisata ini bertujuan untuk memberdayakan SDM dan SDA yang ada agar eksistensi Desa Wisata dapat dapat dikenal dan diakui oleh masyarakat luas, sehingga bisa menjadikan atraksi tersendiri bagi wisatawan yang hanya sekedar datang untuk menikmati suasana pedesaan yang ada di wilayah ini.

4. Letak Administratif, Demografi dan Geografi

Secara administratif Dusun Pulesari merupakan salah satu pembagian dari kewilayahan Padukuhan Becici yang berada di Kalurahan Wonkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Dusun Pulesari memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dusun Ledok Lempong

Sebelah Timur : Dusun Arjosari

Sebelah Selatan : Dusun Kopen

Sebelah Barat : Desa Bangunkerto, Dusun Wonosari

Secara Demografi masyarakat Dusun Pulesari merupakan desa wisata yang mempunyai akulturasi yang berbeda dengan Dusun yang lain. Desa Wisata Pulesari merupakan keanekaragaman potensi yang ada di Indonesia, tetapi memiliki satu kesatuan yang sama terbukti dari semangat gotong royong masyarakat mengolah seni dan budaya yang ada dengan adanya kegiatan rutin tahunan yaitu Upacara Adat Pager bumi selalu dilaksanakan setiap bulan Sapar Rabu Pungkasan.

Luas Wilayah Dusun Pulesari 20,5 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk pertanian/sawah, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun perinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.9
Penggunaan Lahan Dusun Pulesari

No	Nama Dusun	Jenis Penggunaan Lahan								Jumlah
		Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Industri	Perkebunan	Permukiman	Perdagangan dan Jasa	Hutan	Lain-lain	
1	Pulesari	0,25	1,00	-	8,50	9,50	-	-	-	20,5

Sumber : Data Penggunaan Lahan Dusun Pulesari

Dari luasan wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Dusun Pulesari. di Dusun Pulesari lahan sebesar 9,50 Ha digunakan untuk permukiman, 8,50 Ha digunakan untuk perkebunan, 1,00 Ha digunakan untuk ladang/tegalan, dan 0,25 Ha digunakan untuk sawah/ pertanian.

5. Struktur Lembaga/Organisasi

Pelindung	: Lurah Kalurahan Wonokerto
Penasehat	: Dukuh Becici
Ketua	: Sarjan Didik Irwanto
Sekretaris	: Ahmad Latifudin M. Aqni Syafi'i
Bendahara	: Prayitno Agus Suryanto
Seksi Kuliner	: Riyanto Sarijo
Seksi Pertanian Peternakan	: Saekhan Anshori
Seksi Kebersihan	: Edi Nuryanto Subardi Mujiman Mariyah Suyati
Seksi Home Stay	: Rhokim Sumardi
Seksi Pengembangan	: Basri Amarudin
Seksi Keamanan	: Wawan Riyanto Sugeng
Seksi P3K	: Sukri Kukuh Waluyo

6. Logo dan Arti Desa Wisata

Gambar II.2

Logo dan Arti Desa Wisata



Sumber : Data Profil Desa Wisata Pulesari

1. Gambar Rumah Warna Coklat/ Orange artinya :

Merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi dan stabil, menghadirkan kenyamanan, memberi kesan anggun dan elegan. Dapat memberi keyakinan dan rasa aman, warna yang akrab dan menenangkan , bisa mendorong komitmen.

2. Gambar Gunung Warna Hijau artinya :

Bahwasannya di Desa Wisata ini berada di lereng gunung merapi dan warna hijau merujuk pada kesan peruntungan yang baik, kebijakan, kelembutan, kedamaian juga cinta akan desa. warna biru memiliki kesan tenang dan dingin.

3. Tulisan Desa Wisata Warna Coklat/ Orange artinya :

Merujuk pada kesan peruntungan yang baik, kebijakan, kelembutan, kedamaian juga cinta akan desa memiliki kesan tenang dan dingin.

7. Peta Potensi Desa Wisata Pulesari

Gambar II.3

Peta Potensi Desa Wisata



Sumber : Peta Profil Desa Wisata Pulesari

Berdasarkan Peta di atas menunjukkan bahwa di Desa Wisata Pulesari memiliki beranekaragam jenis paket wisata yang disediakan antara lain : Paket Ziarah, Museum Salak, Pertukangan, Rencana Paket Mancing, Bajak Sawah, Wisata Kebun, Pandai Besi, Rencana Flaying Fox, Outbond 5 Permainan, Paket Kerajinan.

Analisa Potensi Desa Wisata

a. Potensi Seni Pertunjukan Kerakyatan dan Budaya

- Kubro Siswo

Gambar II.4

Kubro Siswo



Kesenian ini adalah kesenian kubro siswo bernuansa religi untuk dikolaborasikan dengan gamelan dan musik-musik islami sehingga bisa menjadi sajian tarian budaya religi.

- Tari Salak

Gambar II.5

Tari Salak



tarian salak ini wujud tarian dari sebuah potensi salak pondoh yang ada sehingga dikembangkan menjadi tarian salak yang memiliki daya tarik tersendiri.

- Bergodo/ Prajurit

Gambar II.6
Bergodo/ Prajurit



Bergodo/ Prajurit ini merupakan gerakan barisan yang dilatih untuk mengiringi kegiatan upacara adat dan kegiatan budaya dibarisan utama.

- Bobyok Sari dan Kientingsari

Gambar II.7
Bobyok Sari dan Kientingsari



Kesenian ini merupakan kesenian gabungan dari kientingsari yang dikemas menjadi kesenian goboyok sari.

b. Potensi Alam

- Tracking Sungai

Gambar II.8

Tracking Sungai

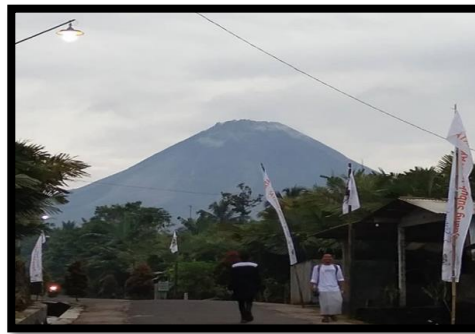


Dengan menikmati alam yang ada disekitarnya melewati sungai serta menikmati gemercik air mengalir yang berhulu dari gunung merapi.

- View Gunung Merapi

Gambar II.9

View Gunung Merapi



Melihat keindahan alam berwujud pemandangan gunung merapi yang indah menjadi daya tarik tersendiri.

- Makam Ziarah Ny. Pulesari

Gambar II.10

Makam Ziarah Ny. Pulesari



Makam ziarah ini adalah tempat bersemayamnya cikal bakal atau pendiri Dusun Pulesari yaitu Ny. Pulesari Kyai Nurrohman dan Tokariyo.

c. Potensi Pendukung Wisata

- Kuliner

Gambar II.11

Kuliner

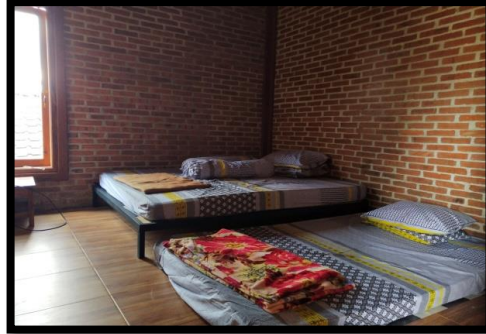


Wisatawan dapat menikmati makanan khas kuliner Desa Wisata Pulesari dengan berbagai macam menu pilihan seperti oseng-oseng salak, sambel salak dan minuman jeaser.

- Home Stay

Gambar II.12

Home Stay



Wisatawan bisa menginap di Home stay dengan fasilitas yang pilih sendiri, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat desa.

- Membatik

Gambar II.13

Membatik



Membatik dengan ciri khas nama batik dewi pule yang menjadi sebuah sajian paket membatik bagi wisatawan.

- Pendopo

Gambar II.14

Pendopo



Fasilitas pendopo sebagai ajang kreasi seni yang ada di Desa Wisata untuk dipertunjukkan kepada wisatawan sehingga menjadi daya tarik kepada wisatawan dan bisa digunakan wisatawan jika ingin mengadakan kegiatan.

8. Slogan Desa Wisata Pulesari

DESA TRADISI

T = entram R = amah A = aman DI = namis S = ehat I = ndah

Desa Tradisi dalam sebuah arti bahwa Desa ini sangat kuat akan ideologi tradisi akulturasi masyarakat yang bersifat religius, yang telah terbentuk secara turun temurun seiring dengan perkembangan jaman sehingga disebut Tradisi tidak melupakan Nilai Seni Budaya yang ada untuk selalu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat tradisional.

9. Visi dan Misi

a. Visi

menciptakan sebuah wujud Desa Wisata Pulesari yang bersih, aman, nyaman, tentram, dinamis serta seni dan berbudaya religius yang berkualitas untuk menjadikan Desa Wisata Pulesari Edukasi masyarakat tradisional.

b. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motivasi dan komitmen bersama membangun pola pikir yang rasional,
2. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya tradisi masyarakat tradisional,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alama (SDA) yang berkualitas dan berkembang,
4. Mengutamakan kualitas Desa Wisata dibandingkan kwanntitas
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun Desa Wisata yang bersih, aman dan nyaman.

10. Data Pemandu Wisata



PENGURUS HARIAN

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. SARJANA | : Kordinator Umum |
| 2. Didik Irwanto | : Kord. Marketing dan Kunjungan Wisata |
| 3. Prayitno | : Kord. Administrasi dan Konsumsi |
| 4. Agus Suryanto | : Kord. Pelaksana Kegiatan dan Event |
| 5. M. Rifa'I | : Kord. Pemandu Wisata |

Tabel II.10 Daftar Nama Kelompok Pemandu

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
Widodo	Sarjono	Riyanto
Sumidi	Supriyadi	Sigit Suwastono
Rudianto	Tukidi	Mujianto
Wawan Supriyanto	Karyanto	Rumanto
Agus Marjoko	Joko Muryanto	Latip
Andi	Suprihatin	Fauzi
Dono	Rudi Susanto	Gimin

KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6
Rhokim	Nur Efendi	Agus Sarmanto
Parmin	Endah Santoso	Kuat Mujianto
Mujiman	Fajar	Bambang Setiawan
Saekhan	Subardi	Darno
Sarijo	Yuliyanto	Bayu Aji
Imam Winarto	Raji	Nurwadi Lor
Diki Anang Soleha	Eka Nurohman	Nurwadi Kidul

KELOMPOK 7	KELOMPOK 8	Keamanan : 1. Sugeng 2. Wawan Riyanto P3K : 1. Sukri 2. Waji Pulyana Kebersihan : 1. Medi Santoso 2. Edi Nuryanto
M. Anshori	Ismanto	
Maryono	Sumardi	
Muh Bakir	Lilik Andrianto	
Triono	Edi Purnomo	
Kukuh Waluyo	Zainuri	
Zainal	Taufiq	
Taufiq Erwansyah	Santoso	

Sumber : Data Pemandu Desa Wisata Pulesari

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa ada 8 kelompok pemandu wisata dengan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang.

II.11 Daftar Nama Kelompok Pemandu Wisata Karang Taruna

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
Endah Santoso	Andi Gunawan	Suparmin
Arifin	Marisa	Juni Handoko
Siti Julaika	Riyanto	M. Sofyan
Rudiyanto	Marisa	Mujiyanto
Tukidi	Maulina	Taufiq Erwansyah
Joko Muryanto	Febrian Pramono	Supriyadi
Fauzi	Zainuri	Yuniati
Kahono	Suprihatin	Lilik Andriyanto
Jumingin	Faizal	Khusna
Daris	Anton	Nisa
Ismi		

KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6	Keamanan : 1. Sugeng 2. Wawan P3K : 1. Sukri 2. Kukuh Kebersihan : 1. Srjono dan Subardi 2. Edi Nuryanto
Diki Anang Soleha	Fajar Febriyanto	Agus Satmanto	
M. Aqni	Wawan Supriyanto	Nurwadi	
Darno	Karyanto	Taufiq	
Ismanto	Raji	Imam Winarto	
Agus Marjoko	Kuat Mujiono	Rumanto	
Miftahul Huda	Zulfi Kurniawan	Andika Pratama	
Dina Pratiwi	Zainal Mustaqim	Sarindi	
Aulia Wulandari	Bambang Setiawan	Kuni Afifah	
Rama	Bambang	Aan	
Arin	Naja	Milu	
Sumardi	Sigit Suastono	Fitri Maysaroh	

Sumber : Data Pemandu Wisata Pulesari

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 kelompok pemandu wisata karang taruna, dan ada 4 kelompok dengan jumlah pemandu 11 orang, sedangkan 2 kelompok berjumlah 10

orang.

Tambahan Pemandu :

Jaga Sekretariat:

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Senin | : Siti Alfiah |
| 2. Selasa | : Dewi Ratih |
| 3. Rabu | : Lulu Inafisah |
| 4. Kamis | : Agus Suryanto |
| 5. Sabtu | : Didik Irwanto |
| 6. Minggu | : Amin Sarjana |

Pengantar Survei :

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Senin | : Saekhan |
| 2. Selasa | : Sumidi |
| 3. Rabu | : Mujiman |
| 4. Kamis | : Saekhan |
| 5. Jumat | : Sumidi |
| 7. Minggu | : Medi Santoso |

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD ACCESS.

Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kuantitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Eko, Sutoro. *Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi*. Governabilitas: Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Eko, Sutoro. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas: Volume 2 Nomor 1, Juni 2021.

Fairuza, M. *Kolaborasi Antarstakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata: Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5, 2017.

Fauziah, Dona. *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017.

Gaffar, Ummu Habibah. *Relasi Aktor Governance dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan Volume 10, Issue 2, 2021.

Hamidah, N. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata: Studi*

- Kasus Objek Wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah Gresik*. Journal of Chemical Information and Modeling 53 (9). 2013.
- Rahmasari, Anggraeni dan Juliani Pujowati. 2017. *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Baru dengan Local Economic Resources Development (LERD)*.
- Raman. Ihyani Malik. Hamrun. *Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume V, Nomor 2, Oktober 2015.
- Sardi, Irwan. *Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari*. Jurnal Analisa Sosiologi Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017.
- Shintani, Armela. *Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan, Volume 9, Issue 2, 2020.
- Simamora, Rotuna Kristin dan Rudi Salam Sinaga. *Peran Pemerintah Daerah Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Suprpta, Ketut Agus Gita dan Gusti Agung Oka Mahagangga. *Relasi Antara Investor Pariwisata dengan Masyarakat Lokal di Desa Pakraman, Kecamatan Ubud: Studi Kasus Konflik Sosial*. Jurnal Destinasi Pariwisata Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Widiastuti, Rina dan Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhsi. *Wacana dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul*. Jurnal Gama Societa Volume 3, Nomor 2, Desember 2019